

# Artikel

*by* faiqotul himma

---

**Submission date:** 10-Jun-2023 01:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2112608852

**File name:** ARTIKEL\_SKRIPSI\_Faiqotul\_Himma.docx (30.58K)

**Word count:** 2483

**Character count:** 16295

17  
**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHAN NO 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PELAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH*  
(OSS RBA)**

**( Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Gresik Provinsi Jawa Timur )**

**Faiqotul Himma**

1  
Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[faiqotulhimma16@gmail.com](mailto:faiqotulhimma16@gmail.com)

**M. Kendry Widiyanto**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[kenronggo@untag-sby.ac.id](mailto:kenronggo@untag-sby.ac.id)

**Radjikan**

Program Studi Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[Radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:Radjikan@untag-sby.ac.id)

**Abstrak**

Pelayanan publik sangat penting bagi masyarakat karena jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan baik maka akan terjadi dampak terhadap suatu tatanan Negara. Di Indonesia pelayanan publik masih terjadi problematika, pelayanan publik dinilai masih belum maksimal. Perizinan berusaha merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan berusaha yang terfokus pada pemerintah yang bertujuan untuk diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik . Dengan perkembangannya jumlah UMKM di seluruh daerah maka pemerintahan mengesahkan kebijakan perizinan berbasis OSS. OSS merupakan pelayanan perizinan usaha terintegritas secara Elektronik yang dibuat oleh lembaga, dan di dasari atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan wakil kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Implementasi tentang pelayanan OSS RBA di DPMPSTP Kabupaten Gresik dengan menggunakan kombinasi teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III dan Van Metter and Van Horn. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif empris atau penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan OSS RBA di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi masih belum optimal, dilihat dari lima indikator dari implementasi kebijakan menurut Edward III dan menurut Van Matter And Van Horn.

**Kata Kunci :** OSS RBA, Implementasi

## A. PENDAHULUAN

Keputusan Kementerian <sup>14</sup> Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 menyatakan tentang “Pelayanan masyarakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi sangat penting apabila jika tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan merusak tatanan suatu negara. Di Indonesia pelayanan publik masih terjadi problematika, pelayanan publik dinilai masih belum maksimal. Prosedur yang digunakan masih berbelit-belit dan rendahnya pengetahuan pegawai sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi, salah satu jenis pelayanan perizinan berfokus pada perizinan usaha. Pernyataan ini didukung oleh kondisi jumlah pelaku ekonomi terus bertambah

UMKM adalah salah satu bentuk usaha dengan basis yang besar, salah satunya berada di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022, akan ada sekitar 56.000 UKM di Kabupaten Gresik (timesindonesia.co.id, 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus pada Pembinaan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Penguatan, Fasilitasi, dan Pemberdayaan Izin Usaha, pernyataan tersebut tertera pada PP No 7 Tahun 2021. Salah satu jenis pelayanan perizinan yang berkonsentrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik lagi adalah perizinan usaha.

Dengan perkembangnya jumlah UMKM <sup>16</sup> di seluruh daerah maka pemerintahan mengesahkan kebijakan perizinan berbasis OSS. PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik menjadi yang pertama mengesahkan OSS. Sebelum disahkannya OSS, pemerintah membentuk PTSP untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan surat izin namun pada kenyataannya pengurusan surat izin melalui DPMPTSP dirasa masih kurang memuaskan. Hal tersebut membuat pemerintahan kementerian coordinator bidang perekonomian mengesahkan OSS.

<sup>34</sup> OSS merupakan Layanan perizinan berusaha secara elektronik yang komprehensif atau dikenal dengan OSS disediakan oleh lembaga atas nama menteri, gubernur, pimpinan lembaga, bupati, dan wakil walikota. Adanya OSS ini sebagai perubahan dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, dan transparan.

OSS pertama kali muncul yaitu OSS versi 1.0 pada tahun 2018 dimana masih banyak kendala yang terjadi, seperti masyarakat masih bingung dalam pemilihan KBLI. KBLI adalah kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk, seperti berupa barang maupun jasa, berdasarkan bidang usaha. (Oss.go.id, 2020). Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengesahkan OSS versi 1.1 pada tahun 2019. Pada versi 1.1 dimana sebelumnya belum terdapat webform sekarang fitur webform sudah terdapat pada system OSS versi 1.1 sehingga seluruh DPMPTSP dapat memberikan pemberitahuan dan pengecekan validasi. Tidak berhenti pada OSS versi 1.1, pemerintahan tetap berusaha dalam memperbaiki kualitas pelayanan perizinan dengan mengesahkan OSS berbasis Resiko atau disebut dengan OSS RBA.

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Risiko yaitu kemungkinan menderita kerugian atau kehilangan uang sebagai akibat dari bahaya, atau sebagai akibat dari kemungkinan dan efeknya (PRESIDEN & INDONESIA, 2021).

Peraturan ini adalah turunan dari UU No 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Implementasi dari peraturan ini yaitu terjadinya perizinan secara elektronik menggunakan publik OSS RBA. Dengan adanya perizinan berusaha berbasis OSS RBA diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan dapat meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha khususnya untuk jenis usaha mikro kecil.

Sebagai contoh Kabupaten Gresik, dimana Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki mayoritas masyarakat sebagai petani, nelayan, dan merupakan daerah industri, namun tidak terpungkiri terdapat banyak masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dengan hadirnya system OSS dapat memudahkan masyarakat untuk pembuatan surat izin berusaha.

Implementasi kebijakan OSS RBA di kabupaten gresik dilaksanakan di DPMPTSP kabupaten gresik. DPMPTSP berperan untuk mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara elektronik mulai pada permohonan izin sampai dengan penerbitan izin. Hal tersebut di dasari oleh peraturan pemerintahan No 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Dengan demikian DPMPTSP kabupaten gresik mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perizinan berusaha. DPMPTSP kabupaten gresik juga mempunyai peran penting dalam berjalanya system OSS

RBA, DPMPTSP kabupetn gresik berhak dalam memberikan ataupun tidak memberikan legalitas kepada pelaku usaha.

**DATA PEMOHON DALAM PENERBITAN NIB DI DPMPTSP KABUPATEN  
GRESIK TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Januari	821
2	Februari	783
3	Maret	997
4	April	822
5	Mei	629
6	Juni	1.020
7	Juli	1.092
8	Agustus	1.100
9	September	2.057
10	Oktober	2.529
11	November	3.620
12	Desember	1.847
<b>TOTAL</b>		<b>17.312</b>

**Tabel 1.1 Data Penerbitan NIB Tahun 2022**

**Sumber : DPMPTSP Kabupaten Gresik**

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP kabupaten gresik telah menerbitkan NIB sebanyak 17.312 pada tahun 2022.

Pelayanan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten gresik tentu mempunyai hambatan seperti masih banyak masyarakat yang gagap akan teknologi sehingga banyak masyarakat yang kurang akan mengerti tentang layanan OSS RBA, ada juga pemohon yang tidak bisa login karena email dan password yang telah di daftarkan lupa. Dan ada juga pemoho yang NIKnya tidak valid. Dan banyak juga pemohon bingung tentang pemasukan KBLI.

Hambatan tersebut sering dialami oleh masyarakat di DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait tentang implementasi OSS RBA. Dengan adanya hambatan tersebut membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi tentang implementasi OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik. Berdasarkan keterangan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan**

**Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Studi di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.”**

30

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan keputusan yang menitikberatkan pada tujuan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut (Robby & Tarwini, 2019) dalam George Edward III (dalam Subarsono, 2011) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dibagi menjadi empat variabel, yaitu:

#### 1. Komunikasi.

Komunikasi adalah bentuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang mengharuskan pelaksana untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi.

#### 2. Sumber Daya.

Sumber Daya merupakan kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

#### 3. Disposisi.

Implementor harus memiliki watak dan karakteristik disposisi seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan benar.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang secara signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP dan fragmentasi.

##### a) Standart Operating Prosedures (SOP)

SOP adalah prosedur yang direncanakan secara rutin yang memungkinkan karyawan untuk melakukan kegiatan mereka setiap hari.

##### b) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya membagi tanggung jawab atas aktivitas atau tindakan karyawan.

Sedangkan implementasi kebijakan Menurut Van Metter and Van Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dari tingkat keberhasilannya suatu implementasi kebijakan dapat diukur.

2. Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang tersedia dapat menilai suatu keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Termasuk organisasi formal dan organisasi informal. Variabel ini sangat penting karena karakteristik agen penegak hukum yang tepat sangat mempengaruhi penegakan politik.

4. Sikap / kecenderungan (Disposition) pada pelaksana

Sikap penerima / penolakan dapat mempengaruhi keberhasilan atau tidak kinerja implementasi kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Semakin baik koordinasi komunikasi kepada pihak terkait maka semakin baik implementasi kebijakan tersebut dan akan sangat kecil tingkat kesalahan.

6. Lingkungan ekonomi, Sosial dan politik

Variabel ini juga diperlukan ketika mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

Dari keenam variabel menurut Van Metter and Van Horn, penulis mengambil salah satu variabel yaitu variabel lingkungan ekonomi, publik dan politik yang akan di kombinasikan dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang mempunyai empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif empris atau penelitian lapangan (*field research*). Obyek penelitian ini adalah implementasi pendekatan berbasis risiko OSS RBA pada pelayanan perizinan perusahaan di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini fokus pada menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat memahami setiap fakta yang terjadi dilapangan dan dapat memecahkan permasalahan. Dengan menggunakan Teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan



kombinasi teori implementasi kebijakan menurut Van Matter And Vam Horn, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik yang mengurus pelayanan dalam bidang perizinan. Yang beralamat di Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo No 245 kecamatan kebomas kabupaten Gresik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam kegiatan ini terdapat informan yang akan menjadi narasumber yaitu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan usaha dan Perizinan Komersial Alat Oprasional di DPMPTSP Kabupaten Gresik, Staf di Pojok OSS DPMPTSP Kabupaten Gresik, dan Pemohon Layanan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem OSS RBA pada DPMPTSP Kabupaten Gresik dengan menggunakan perpaduan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dan Van Matter And Vam Horn dengan lima indikator dalam keberhasilan implementasi kebijakan, faktor tersebut Antara lain :

##### **4.3.1 Komunikasi**

Dengan adanya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada pelaku usaha. PP No 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko OSS RBA dan PP No 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah menjadi landasan pelaksanaan perizinan bersama melalui sistem OSS RBA. Komunikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Gresik yaitu dengan kegiatan sosialisasi seperti melakukan sosialisasi di kantor-kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di daerah untuk melaksanakan perizinan berusaha melalui OSS RBA. Ketidaktahuan publik tentang kemajuan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang sistem OSS RBA menimbulkan hambatan lebih lanjut.



#### **4.3.2 Sumber Daya**

Pegawai DPMPTSP Kabupaten Gresik dinilai mampu menjalankan tugasnya, karena telah mengikuti pelatihan dan pembinaan secara online maupun offline. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di DPMPTSP Kabupaten Gresik mengenai pelayanan OSS RBA sudah cukup baik seperti terdapat computer, printer, tablet jaringan internet / wifi dan juga mempunyai 4 loket pelayanan. Akan tetapi masih terdapat kendala yaitu terjadinya kendala sistem OSS dari pusat dan jaringan wifi yang terkadang tidak stabil..

#### **4.3.3 Disposisi**

Di DPMPTSP Kabupaten Gresik, setiap petugas pelayanan perijinan usaha dituntut untuk berdedikasi dalam memenuhi semua kewajibannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi hal-hal buruk, seperti penyalahgunaan anggaran, nepotisme, dan kolusi. Jika petugas layanan melanggar dan gagal menjalankan tugasnya, maka akan ada sanksi. Sesuai yang tertera di PERBUP Nomor 94 tentang perizinan dan non perizinan tahun 2021 pada BAB IX bagian kesatu tentang pengendalian dan evaluasi pasal 28 ayat 2.

#### **4.3.4 Struktur Birokrasi**

Kebijakan pemerintahan pusat telah didukung penuh DPMPTSP Kabupaten Gresik terkait sistem perizinan berusaha di daerah berdasarkan PP No 6 Tahun 2021, dan terkait pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko sesuai PP No 5 Tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Gresik sebagai tempat pelaksanaan Implementasi Kebijakan OSS RBA. Tugas dan wewenang telah diatur berdasarkan landasan hukum yang jelas. Sesuai dengan PERBUP Nomor 89 Tahun 2022 tentang *Standart Oprasional Prosedur (SOP)* pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.

#### **4.3.5 Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial**

Berhasilnya suatu program ditujukan oleh kondisi ekonomi, politik dan sosial yang terdapat dalam suatu instansi atau organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan informan diatas mengenai sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik bahwa dengan yang terlihat dari fakta di lapangan, program ini sudah berhasil.. Dilihat dari hasil wawancara masyarakat bahwa adanya sistem OSS RBA ini

dapat membantu kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Terbukti dari jumlah masyarakat yang menerbitkan NIB pada tahun 2022 yaitu sebanyak 17.312.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berikut kesimpulan dari kajian dan pembahasan diatas terkait OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan OSS RBA di Kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi masih belum sepenuhnya optimal, dilihat dari lima indikator implementasi kebijakan menurut Edward III dan menurut Van Matter And Van Horn yaitu :

- a. Komunikasi sudah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat gresik.
- b. Sumber Daya sudah cukup memadai dalam proses pelayanan surat izin berusaha.
- c. Disposisi pemerintahan daerah telah mendukung penuh adanya sistem OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Gresik dan implementor kebijakan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 tentang perizinan dan non perizinan tahun 2021.
- d. Struktur Birokrasi dimana Struktur Organisasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan *PERBUP Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Oprasional Prosedur* pelayanan perizinan berusaha dan non perizina di DPMPTSP Kabupaten Gresik.
- e. Kondisi ekonomi, politik dan sosial kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem OSS RBA di kabupaten Gresik, sebab dilihat dari jumlah penerbitan NIB tahun 2022 yang berjumlah 17.312.

Akan tetapi terdapat <sup>25</sup> faktor penghambat dalam proses Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan OSS RBA di Kabupaten Gresik yaitu seperti kendala internal terkait jaringan wifi, peralatan sarana dan prasarana yang rusak dan terjadinya kendala sistem biasanya terpusat. Sedangkan secara eksternal adalah masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan OSS RBA sebab kebanyakan orang awam yang tidak bisa memanfaatkan teknologi.

### **Saran**

Bagi <sup>2</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diharapkan <sup>1</sup> untuk melakukan pendampingan secara langsung pada saat sosialisasi sebab masih <sup>1</sup> banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi dengan baik. Dan untuk sarana dan prasarananya harus lebih ditingkatkan lagi terutama masalah jaringan dan komputer yang terkadang tidak bisa digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- timesindonesia.co.id. (2022). *Program Satu Data Terpadu, Pelaku UMKM dan Koperasi di Gresik Bakal Didata Ulang*. Timesindonesia.Co.Id. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405488/program-satu-data-terpadu-pelaku-umkm-dan-koperasi-di-gresik-bakal-didata-ulang#:~:text=Dari data Diskoperindag%2C tahun 2022,sebagai informasi satu data Indonesia.>
- PRESIDEN, & INDONESIA, R. (2021). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO*. 087293.
- Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 10(2), 51–57.

# Artikel

---

## ORIGINALITY REPORT

---

26%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://aksiologi.org">aksiologi.org</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	Helmi Helmi. "Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme", Undang: Jurnal Hukum, 2021 Publication	2%
5	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%

---

9	Internet Source	1 %
10	<a href="https://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
13	<a href="https://jiap.ub.ac.id">jiap.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="https://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet Source	1 %
15	Ismail Umar, Sunarsih Sunarsih, Desvira Zain. "Implementasi Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Dinas terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Kota Singkawang", Eksos, 2021 Publication	1 %
16	Joni Dawud, Deni Fauzi Ramdani, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar. "Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung", Jurnal Wacana Kinerja:	1 %

# Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2021

Publication

---

17	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	Dyah Fitriani Adiningsih, Sutaryono Sutaryono, Wahyuni Wahyuni. "Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah", Tunas Agraria, 2023 Publication	<1 %
19	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
20	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://baladena.id">baladena.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://gudangmakalah.blogspot.com">gudangmakalah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://mmc.kalteng.go.id">mmc.kalteng.go.id</a> Internet Source	<1 %
24	Nany Librianty. "PENGELOLAAN PENDIDIKAN FULLDAY SCHOOL DI SDN 002 BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR", Jurnal Basicedu, 2018	<1 %



---

25 [ejournal3.undip.ac.id](http://ejournal3.undip.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

26 [jasp.fisip.unila.ac.id](http://jasp.fisip.unila.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

27 [jurnal.umrah.ac.id](http://jurnal.umrah.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

28 [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

29 [repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

30 Evi Novita, Surahman Surahman, Dessy Damayanthi. "IMPLEMENTASI PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PASAL 33 DALAM UUD'45", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2020  
Publication

---

31 Silvi Aulia. "Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang", The World of Public Administration Journal, 2022  
Publication

---

32 [adoc.tips](http://adoc.tips) <1 %  
Internet Source

---

[repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)

33

Internet Source

<1 %

---

34

[repository.uinsaizu.ac.id](https://repository.uinsaizu.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

35

[scholar.unand.ac.id](https://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# Artikel

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---